

# 5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 PENDAHULUAN

### 5.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1.1.1 *Maksud*

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

#### 5.1.1.2 *Tujuan*

Secara umum, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah serta perubahannya;
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai cara entitas akuntansi mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

### 5.1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur secara Daring;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

### **5.1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. **Pendahuluan**  
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
2. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**  
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. **Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**  
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.
4. **Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan**  
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.
5. **Penutup**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas Awal		291.807.800.769,49	217.082.321.782,69
2	Surplus/Defisit - LO		17.860.027.021.621,00	17.153.880.196.144,80
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		(17.867.110.825.877,00)	(17.101.912.956.372,00)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		3.065.573.796,00	22.758.239.214,00
<b>Ekuitas Akhir (1+2+3+4)</b>			<b>287.789.570.309,49</b>	<b>291.807.800.769,49</b>

### 3 LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>		18.387.623.424.367,00	17.651.757.567.779,00	735.865.856.588,00	4,17
11	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>		18.387.623.424.367,00	17.651.757.567.779,00	735.865.856.588,00	4,17
1101	Pajak Daerah-LO		18.361.273.190.939,00	17.625.493.439.330,00	735.779.751.609,00	4,17
1102	Retribusi Daerah-LO		4.132.440.400,00	3.888.273.800,00	244.166.600,00	6,28
1104	Lain-lain PAD yang Sah-LO		22.217.793.028,00	22.375.854.649,00	(158.061.621,00)	-0,71
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO</b>		18.387.623.424.367,00	17.651.757.567.779,00	735.865.856.588,00	4,17
2	<b>BEBAN DAERAH</b>		529.710.989.074,00	497.907.371.634,20	31.803.617.439,80	6,39
21	<b>BEBAN OPERASI</b>		529.710.989.074,00	497.907.371.634,20	31.803.617.439,80	6,39
2101	Beban Pegawai		283.675.851.201,00	280.453.818.625,00	3.222.032.576,00	1,15
2102	Beban Barang dan Jasa		228.469.800.511,67	198.656.791.412,20	29.813.009.099,47	15,01
210201	Beban Barang		25.543.006.179,98	25.162.856.740,82	380.149.439,16	1,51
210202	Beban Jasa		151.696.189.638,69	134.404.768.639,38	17.291.420.999,31	12,87
210203	Beban Pemeliharaan		34.216.374.824,00	27.445.238.488,00	6.771.136.336,00	24,67
210204	Beban Perjalanan Dinas		17.014.229.869,00	11.643.927.544,00	5.370.302.325,00	46,12
2107	Beban Penyisihan Piutang		5.879.965,33	7.069.570,00	(1.189.604,67)	-16,83
2108	Beban Penyusutan dan Amortisasi		17.559.457.396,00	18.789.692.027,00	(1.230.234.631,00)	-6,55
24	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN DAERAH</b>		529.710.989.074,00	497.907.371.634,20	31.803.617.439,80	6,39
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL</b>		17.857.912.435.293,00	17.153.850.196.144,80	704.062.239.148,20	4,10
3	<b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		2.114.586.328,00	30.000.000,00	2.084.586.328,00	6948,62
31	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>		2.140.280.868,00	30.000.000,00	2.110.280.868,00	7034,27
3101	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		39.988.937,00	30.000.000,00	9.988.937,00	33,30
3102	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3103	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		2.100.291.931,00	0,00	2.100.291.931,00	0,00
32	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>		25.694.540,00	0,00	25.694.540,00	0,00
3201	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		25.694.540,00	0,00	25.694.540,00	0,00
3202	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		2.114.586.328,00	30.000.000,00	2.084.586.328,00	6948,62
4	<b>POS LUAR BIASA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA-LO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Pendapatan Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>BEBAN LUAR BIASA-LO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Beban Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		17.860.027.021.621,00	17.153.880.196.144,80	706.146.825.476,20	4,12

## 2 NERACA



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**NERACA**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>ASET</b>		<b>376.693.068.740,49</b>	<b>366.882.124.907,49</b>
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>		<b>18.521.616.399,53</b>	<b>19.368.722.186,53</b>
1101	Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah		1.168.036.400,00	1.829.143.698,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.175.993.065,00	1.151.666.700,00
1110	Penyisihan Piutang		(64.281.795,33)	(96.207.832,00)
1111	Beban Dibayar Dimuka		248.760.630,42	410.068.942,11
1112	Persediaan		15.993.108.089,44	16.073.070.678,42
1113	Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>		<b>352.344.127.823,75</b>	<b>341.342.291.291,96</b>
1301	Tanah		180.474.903.112,00	181.794.721.112,00
1302	Peralatan dan Mesin		297.113.173.964,00	293.215.492.641,00
1303	Gedung dan Bangunan		173.637.876.077,75	159.350.188.842,96
1304	Jalan, Jaringan, dan Instalasi		795.565.600,00	730.827.300,00
1305	Aset Tetap Lainnya		561.155.561,00	561.155.561,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.899.659.030,00	4.427.316.255,00
1307	Akumulasi Penyusutan		(302.138.205.521,00)	(298.737.410.420,00)
<b>15</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		<b>5.827.324.517,21</b>	<b>6.171.111.429,00</b>
1503	Aset Tidak Berwujud		6.434.832.650,00	6.434.832.650,00
1504	Aset Lain-lain		15.267.775.110,21	10.261.069.661,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(5.095.613.953,00)	(4.718.212.544,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(10.779.669.290,00)	(5.806.578.338,00)
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>376.693.068.740,49</b>	<b>366.882.124.907,49</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		<b>88.903.498.431,00</b>	<b>75.074.324.138,00</b>
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>88.903.498.431,00</b>	<b>75.074.324.138,00</b>
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	4.566.000,00
2106	Utang Belanja		88.903.498.431,00	75.069.758.138,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>88.903.498.431,00</b>	<b>75.074.324.138,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>		<b>287.789.570.309,49</b>	<b>291.807.800.769,49</b>
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>		<b>287.789.570.309,49</b>	<b>291.807.800.769,49</b>
3101	Ekuitas		287.789.570.309,49	291.807.800.769,49
310101	Ekuitas		(17.572.237.451.311,50)	(16.862.072.395.375,30)
310102	Surplus/Defisit-LO		17.860.027.021.621,00	17.153.880.196.144,80
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>287.789.570.309,49</b>	<b>291.807.800.769,49</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>376.693.068.740,49</b>	<b>366.882.124.907,49</b>